

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan unsur pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kotawaringin Barat salah satu perangkat daerah dari 38 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki luas wilayah 10.759 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 269.629 jiwa, terbagi dalam 6 (enam) kecamatan serta 81 Desa dan 13 Kelurahan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal sebanyak 4 (empat) buah instansi yaitu Kodim 1014 Pangkalan Bun, Polres Kotawaringin Barat, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, dan Sub Denpom Pangkalan Bun.

Perubahan status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perubahan nomenklatur sebagai pengganti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ditetapkannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai perangkat daerah maka berkewajiban untuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 sebagai kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah terpilih berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah khususnya pada tahun 2019.

## BAB II

### VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017–2022 adalah *“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”*

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Maju pembangunan sesuai **IPTEK** dan **INFRASTRUKTUR** yang representative.
2. Masyarakat yang bermoral punya **KETAKWAAN** pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Keberagaman masyarakat yang **HARMONIS**.
4. Interaksi dan pergaulan yang **LANGGENG**.
5. Keberadaan hidup yang **AMAN**.
6. Kehidupan masyarakat **SEJHTERA**, cukup pangan, sandang dan papan.

Adapun Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017–2022 terdiri dari 6 (enam) poin sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut maka dapat dirumuskan rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ada 2 (dua) strategi antara lain :

1. Dari perspektif masyarakat/layanan :

**Strategi** : Mengoptimalkan stakeholder yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

2. Dari Perspektif kelembagaan :

**Strategi** : Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat yang terpilih maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

#### A. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022 yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional Menjaga kerukunan umat beragama.
2. Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air.
3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

#### B. Sasaran

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Tujuan* diatas adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
2. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
3. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
4. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
6. Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional.

#### C. Program

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan akan diuraikan sebagai berikut :

##### a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan pembinaan karakter bangsa di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

1. Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

**b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta pencegahan terjadinya konflik sosial. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
2. Pencegahan dan penanganan konflik sosial.

**c. Program pendidikan politik masyarakat**

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan peran serta masyarakat, pemilih pemula dan para peserta pemilu (partai politik). Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

1. Penyuluhan kepada masyarakat
2. Forum-forum diskusi politik.

**d. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan**

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi memberikan pemahaman dan pembinaan kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan untuk peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut :

1. Pembinaan Ormas dan LSM.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM.

## **BAB IV**

### **KEBUTUHAN DATA KINERJA**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 yang merupakan rencana tahunan SKPD disusun berdasarkan pada beberapa sumber-sumber data dari dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan pedoman awal dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), adapun sumber-sumber data tersebut antara lain:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022.
2. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019.

## BAB V

### RENCANA KINERJA

#### Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
2. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
3. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
4. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
6. Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional.

Dari beberapa sasaran strategis diatas dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator kinerja yang merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 :

1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Tingkat Kepatuhan Aparatur
4. Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya
5. Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Jumlah konflik yang bernuansa SARA
7. Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas
8. Persentase peningkatan pemilih yang dibina pada pemilu
9. Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina

Adapun untuk target dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019, *Tabel RKT dan PK Terlampir* .

**BAB V**  
**RENCANA KINERJA**

Demikian Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai wujud atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ssebagai alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, dapat mewujudkan target kinerja yang bertanggung jawab dan terarah guna menunjang pembangunan daerah.

Pangkalan Bun,     Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN  
KAB. KTW. BARAT**



**H. MUDELAN, S.Sos**  
**NIP. 19600215 198203 1 013**